



RENCANA OPERASIONAL TINGGAL JANJI
**RUMAH SAKIT BARU
JANGAN JADI
RUMAH HANTU**

BACA SELENGKAPNYA DI HALAMAN 2

RSUD TANJUNG REDEB BATAL BEROPERASI

Ditunda Enam Bulan Lagi

RENCANA operasional RSUD Tanjung Redeb yang semula ditargetkan pada 20 Mei 2026, dipastikan batal terealisasi. Hingga kini, Pemerintah Kabupaten Berau bahkan belum dapat memastikan waktu pembukaan rumah sakit pelat merah itu.

Ketidakpastian ini memicu tanda tanya besar mengenai kesiapan pemerintah daerah dalam mengeksekusi proyek infrastruktur kesehatan tersebut.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Berau, Hendratno, menjelaskan, penentuan tanggal operasional baru masih harus menunggu instruksi pucuk pimpinan daerah. Di tingkat bawah, tim teknis juga masih terus bekerja keras untuk melengkapi seluruh indikator kelayakan fasilitas kesehatan.

Hendratno menyampaikan, belum bisa beroperasinya RSUD baru tersebut tidak terlepas dari faktor administratif serta beberapa aspek teknis lainnya yang masih harus dilengkapi. Berbagai kesiapan itu sebenarnya telah

dibahas melalui rapat koordinasi progres kesiapan RSUD Tanjung Redeb pekan lalu.

Ia menambahkan, evaluasi yang dilakukan oleh tim gabungan sejauh ini masih berkuat pada penguatan sektor legalitas dokumen pendukung. Ke depan, pemangku kebijakan masih akan terus menggelar rangkaian uji kelayakan sebelum bangunan benar-benar dibuka untuk melayani pasien.

Terkait kelengkapan dokumen izin operasional RSUD Tanjung Redeb, Hendratno menegaskan, seluruh prosesnya hingga kini masih terus berjalan di tingkat provinsi maupun pusat.

Pemkab Berau berkomitmen segera membereskan seluruh urusan birokrasi tersebut dalam waktu dekat demi keamanan pelayanan medis.

Kepala Dinas Kesehatan Berau, Lamlay Sarie, juga membenarkan pengoperasian RSUD Tanjung Redeb mundur sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Lamlay menerangkan, saat ini pihaknya masih dalam fase memenuhi berbagai regulasi

dan fisik. Penentuan tanggal seremoni peresmian sengaja tidak diumbar ke publik demi menghindari spekulasi, mengingat indikator kelayakan sebuah rumah sakit sangat kompleks.

“Untuk bisa menyebutkan tanggalnya belum bisa kita pastikan ya, karena komponen kelengkapannya itu masih banyak,” ungkap Lamlay, Selasa (26/5/2026).

Perhatian utama Dinas Kesehatan Berau saat ini sengaja ditumpahkan pada penyusunan dan pengawalan payung hukum berupa peraturan daerah terkait tarif pelayanan rumah sakit.

Lamlay mengakui ada segudang dokumen administrasi lain yang harus diselesaikan. Namun, detail regulasi tersebut baru akan dipaparkan secara transparan saat agenda audiensi publik nanti.

“Secara umum sih peraturan daerah tentang perda tarif, tarif rumah sakit harus ada. Sebenarnya komponennya banyak, cuma salah satunya itu,” ujarnya.

Lamlay menganalogikan, untuk mengoperasikan sebuah



LAMLAY SARIE

Kepala Dinas Kesehatan
Berau



Kalau kita menentukan tanggal, bulan, tahun, itu harus dihitung semua, komponen itu dihitung estimasi plus resiko yang bakal kita temui”

rumah sakit baru, standarisasi yang dilewati hampir serupa dengan persyaratan dokumen Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Seluruh instrumen, mulai tata kelola administrasi perkantoran hingga kesiapan teknis operasional di ruang perawatan, wajib sinkron tanpa celah.

BACA SELENGKAPNYA DI HALAMAN 3





Menariknya, saat disinggung mengenai kesiapan kuota tenaga kesehatan, Lamlay menegaskan urusan itu berada pada prioritas kesekian. Baginya, administrasi dan legalitas hukum merupakan komponen utama yang wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh pemerintah daerah.

Dinkes Berau enggan gegabah menetapkan tenggat waktu peluncuran karena segala sesuatunya wajib melewati kalkulasi matematis yang matang. Setiap komponen harus dihitung secara presisi, mulai estimasi biaya hingga mitigasi risiko pelayanan yang berpotensi muncul di masa depan jika dipaksakan buka tanpa kesiapan matang.

"Kalau kita menentukan tanggal, bulan, tahun, itu harus dihitung semua, komponen itu dihitung estimasi plus resiko yang bakal kita temui," jelas Lamlay.

Lebih jauh, ia merefleksikan, mendirikan dan membuka sebuah rumah sakit berskala besar di pusat ibu kota kabupaten bukanlah pekerjaan rutin Dinas Kesehatan.

Selama ini, pemkab baru pernah membuka instalasi rumah sakit di wilayah pesisir, tepatnya di Talisayan, dan belum pernah mengeksekusi proyek serupa di wilayah perkotaan.

"Kalau sesuatu yang tidak lazim itu, apalagi kalau pelayanan kesehatan dia kan mesin 24 jam, enggak boleh stop. Jadi seperti kita mengoperasikan pesawat 24 jam

enggak boleh salah," urainya.

Bupati Berau, Sri Juniarsih, menyebutkan, berdasarkan arah kebijakan terbaru, operasional rumah sakit baru di Tanjung Redeb kini tengah diupayakan agar dapat berjalan dalam waktu enam bulan. Rumah sakit daerah terpaksa diundur karena adanya beberapa pertimbangan yang perlu diselesaikan pemerintah daerah.

Sri Juniarsih menjelaskan, proyek rumah sakit baru ini sebenarnya sudah sangat siap jika ditinjau dari segi ketersediaan alat kesehatan. Hanya saja, saat ini pemerintah daerah terbentur peraturan dari Kementerian Dalam Negeri.

Dalam aturan itu disebut keberadaan dua rumah sakit dalam satu wilayah yang sama tidak diperbolehkan menggunakan satu ikatan BPJS saja: regulasi tersebut mutlak tidak boleh dilanggar.

"Ketika kami melanggar, maka akan melanggar regulasi yang ada," ujar Sri Juniarsih, Kamis (28/5/2026).

Melalui pertimbangan tersebut, ia memilih untuk tidak menabrak regulasi yang berlaku, meskipun konsekuensinya harus terlambat dalam mengoperasikan fasilitas rumah sakit baru tersebut.

Namun, pemerintah daerah memastikan momentum ini digunakan untuk mematangkan persiapan layanan rawat inap sekaligus, bukan sekadar pelayanan rawat jalan.

Ia menegaskan, alasan di-



undurnya operasional layanan kesehatan ini sama sekali bukan bersumber dari urusan alkes. Masalah logistik medis telah klir karena kesiapan alkes selama ini sudah diusahakan secara optimal melalui sokongan dana dari Kementerian Kesehatan, Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim, hingga APBD murni.

"Saya bersiap-siap untuk ke depan mungkin 5-6 bulan ke depan kita agak delay sedikit, tetapi kami sudah kepada persiapan untuk rawat inap," tuturnya.

Sri Juniarsih mengatakan, Dinas Kesehatan menargetkan operasional rumah sakit baru tersebut sekitar 6-7 bulan ke depan. Namun, ia tetap mengupayakan agar pelayanan bisa dibuka secepat mungkin.

Dia berencana segera mengambil langkah untuk mengurus persoalan BPJS langsung ke Kementerian Kesehatan karena aspek itulah yang menjadi hambatan utama di lapangan.

"Saya upayakan secepat

mungkin karena kami harus ke Menteri Kesehatan untuk BPJS, itu yang menghambat," katanya.

Karena skema rawat inap langsung akan diterapkan sejak awal buka, maka tenaga kesehatan juga wajib dipersiapkan secara matang.

Mengenai opsi pemenuhan tenaga kesehatan, Pemkab Berau memilih untuk mengajukan permohonan dokter langsung dari Kementerian Kesehatan.

Menurutnya, tenaga kesehatan bisa dikirim dari mana saja asalkan mekanismenya tidak melanggar regulasi. Langkah ini diambil karena jika daerah harus mengangkat atau merekrut tenaga kesehatan sendiri, hal itu dinilai tidak memungkinkan akibat keterbatasan anggaran daerah.

"Kalau kita mengangkat enggak mungkin karena keterbatasan anggaran dan regulasi yang kita hadapi saat ini. Mungkin dari kementerian bisa membantu kami untuk tenaga kesehatan, terutama untuk spesialis," pungkas Sri Juniarsih. **(ADRIKNI SHOLIKHATI)**



Akhiri Krisis Air Bersih Maratua

Teknologi Desalinasi Jadi Solusi

ANCAMAN krisis air bersih di Pulau Maratua kini mulai mendapatkan perhatian Pemerintah Kabupaten Berau.

Bupati Berau, Sri Juniarsih, menegaskan, pihaknya terus mengupayakan solusi terbaik dengan menggelar diskusi bersama Organisasi Perangkat Daerah guna merampungkan persoalan pelik tersebut.

Secara khusus, ia meminta instansi terkait untuk mulai fokus pada rencana pembuatan sistem desalinasi air laut. Langkah ini dinilai sebagai salah satu solusi jangka panjang untuk menyediakan air bersih yang stabil di Pulau Maratua.

Namun, karena penerapan teknologi desalinasi tidak mudah dan butuh biaya tidak murah, pemerintah daerah memilih memaksimalkan lebih dulu potensi embung yang sudah tersedia.

"Saya sudah mengarahkan kepada desalinasi, tapi mungkin pembiayaannya tidak murah, mungkin kami maksimalkan embung yang ada dulu sambil kami berproses untuk desalinasi," ungkap Sri Juniarsih, Kamis (28/5/2026).

Fasilitas embung yang ada

sekarang akan segera dilengkapi sarana pendukungnya agar bisa secepatnya dioperasikan secara fungsional sembari menunggu proses persiapan desalinasi matang.

Menurut Sri Juniarsih, ancaman kemarau panjang yang diperkirakan segera melanda membuat pemerintah tidak bisa hanya bergantung pada embung sebagai satu-satunya tumpuan sumber air bersih.

Oleh sebab itu, realisasi proyek desalinasi diharapkan bisa segera dikebut secepatnya.

Ia menaruh harapan agar alokasi anggaran daerah ke depan bisa langsung digunakan untuk memprioritaskan pembuatan sistem desalinasi air laut tersebut.

"Karena memang kalau menunggu embung di tengah kemarau seperti ini enggak mungkin, dan mungkin kita menunggu hujan ya. Saya harapkan mudah-mudahan anggaran bisa kami prioritaskan untuk desalinasi," jelasnya.

Ia berkomitmen terus mengupayakan fasilitas terbaik bagi keberlangsungan sektor pariwisata Berau, di mana penyediaan desalinasi menja-

di salah satu agendanya.

Pihaknya saat ini akan mempelajari skema pembiayaan proyek, apakah desalinasi bisa melibatkan kontribusi dana CSR dari swasta atau murni bersumber dari APBD.

"Ada beberapa tahapan untuk desalinasi, mulai dari harga terendah sampai tertinggi sudah punya datanya," kata Sri Juniarsih.

Wakil Bupati Berau, Gamalis, juga menegaskan pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi atas persoalan keterbatasan air bersih di Maratua.

Menurutnya, saat ini masyarakat di sana masih bergantung pada satu sumber air tawar yang digunakan bersama sejumlah kampung. Kondisi ini jelas tidak ideal di tengah lonjakan populasi dan kunjungan pelancong.

"Pembangunan embung itu belum selesai. Kita berharap ketika nanti selesai, kita berharap permasalahan air di Kepulauan Maratua bisa teratasi," katanya, Senin (25/5/2026).

Gamalis menambahkan, pemenuhan kebutuhan air bersih di Maratua kini dinilai-



SRI JUNIARSIH
Bupati Berau

Saya sudah mengarahkan kepada desalinasi, tapi mungkin pembiayaannya tidak murah, mungkin kami maksimalkan embung yang ada dulu sambil kami berproses untuk desalinasi"

ya semakin penting seiring dengan tumbuh pesatnya pariwisata. Banyaknya resort dan penginapan baru di destinasi wisata unggulan tersebut membuat kebutuhan air terus meningkat setiap harinya.

BACA SELINGKAPNYA DI HALAMAN 5

"Maratua hari ini sudah menjadi destinasi wisata. Resort dan penginapan sudah banyak untuk menyambut wisatawan. Kalau air kurang tentu akan menjadi persoalan," ungkapnya.

Gamalis juga menyatakan dukungannya terhadap usulan DPRD Berau terkait kemungkinan pembangunan teknologi penyulingan air laut menjadi air bersih di wilayah kepulauan.

"Tentu akan kita pelajari lebih lanjut. Saya sepakat dengan usulan anggota DPRD tersebut. Teknologi penyulingan air asin ini harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di Kepulauan Maratua," jelasnya.

Pemerintah daerah sangat terbuka terhadap berbagai inovasi yang dapat menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

"Kalau itu memang ide yang bagus dan bisa menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan air di Kepulauan Maratua, tentu harus kita lakukan," pungkasnya.

Sebelumnya, DPRD Berau menegaskan sudah pernah mengajukan usulan resmi terkait penerapan teknologi desalinasi di kawasan wisata. Langkah ini menjadi jalan keluar paling konkret untuk menyudahi permasalahan kelangkaan air yang terus berulang dari tahun ke tahun.

Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, mengatakan, nilai investasi untuk pengadaan sistem teknologi desalinasi tidak begitu memakan banyak biaya. Dengan proyeksi anggaran antara Rp2-5 miliar, perangkat penyulingan air laut tersebut diklaim sudah bisa diadakan di lapangan.



Keberadaan alat ini diyakini mampu mempermudah kehidupan sehari-hari masyarakat di wilayah yang rentan mengalami kekeringan.

Menurut Sumadi, jika pemerintah daerah hanya terus mengandalkan sumber mata air alami atau tadahan yang ada saat ini, pasokan tersebut dipastikan tidak akan pernah mencukupi kebutuhan warga setempat. Terlebih lagi, sejumlah fasilitas infrastruktur penampungan air yang sudah selesai dibangun juga dilaporkan belum berfungsi sama sekali sampai sekarang.

Oleh sebab itu, ia menaruh harapan yang sangat besar agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau berani membuat terobosan baru. DPUPR Berau diminta tanggap melakukan akselerasi penanganan air bersih di daerah wisata utama, terutama di Maratua.

JERITAN WARGA MARATUA

Dampak nyata dari krisis air bersih yang berlarut-larut ini akhirnya memicu desakan kuat dari tingkat bawah. Pemerintah Kampung Payung-Payung menaruh harapan agar proyek pembangunan embung di wilayah mereka bisa segera dirampungkan dan difungsikan.

Kepala Kampung Payung-Payung, Rico, menjelaskan, kesulitan mendapatkan akses air bersih ini sebenarnya sudah terjadi selama bertahun-

hun-tahun tanpa ada solusi permanen.

Masalah mendasar tersebut seolah menjadi momok yang selalu timbul dan tenggelam, terutama saat musim kemarau mulai membayangi pulau terluar tersebut.

Beruntung, selama masa sulit ini, Kampung Teluk Harapan memiliki fasilitas sumur bor yang berfungsi dengan baik, sehingga sisa air bakunya masih bisa ikut dimanfaatkan warga dari kampung lain. Namun, untuk kebutuhan harian yang mendesak, sebagian besar masyarakat terpaksa harus merogoh kocek cukup dalam demi mendapatkan pasokan air bersih.

"Masyarakat itu kalau saya lihat ya masih sanggup membeli air yang Rp80-100 ribu per tandon itu," ujar Rico.

Terkait keberadaan proyek embung yang dibangun pemerintah daerah di kampungnya, Rico mengaku tidak begitu mengikuti perkembangannya secara langsung.

Namun, berdasarkan informasi informal yang ia terima, proyek embung tersebut memang belum selesai sepenuhnya akibat terbentur masalah pendanaan. Embung itu dinilai masih membutuhkan kelengkapan fasilitas penunjang di dalamnya yang hingga kini belum rampung digarap.

"Saya tidak begitu mengikuti dua kegiatan ini, tapi yang saya



GAMALIS
Wakil Bupati Berau

Saya sepakat dengan usulan anggota DPRD tersebut. Teknologi penyulingan air asin ini harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di Kepulauan Maratua"

tahu dari teman-teman PUPR itu pendanaannya itu belum didanai, sehingga embung itu belum selesai sepenuhnya terbangun," tegas Rico.

Rico sangat berharap agar instansi teknis terkait segera mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan sisa pengerjaan infrastruktur tersebut. Fasilitas modern ini dinilai menjadi satu-satunya harapan sebagai sumber cadangan air bagi masa depan seluruh masyarakat di Pulau Maratua.

"Untuk embungnya sendiri harapan saya pribadi, tolong itu diselesaikan dengan baik, sehingga dana yang digelontorkan berapa miliar itu berfungsi juga dimanfaatkan untuk masyarakat Maratua," pungkash Rico. **(ADRIKNI SHOLIKHATI)**



SEMANGAT IDULADHA DI BERAU

Ekonomi Lesu, Berbagi Tetap Nomor Satu

NUANSAs penuh kebersamaan begitu kental mewarnai perayaan Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah di Kabupaten Berau. Perayaan ini menjelma sebagai panggung solidaritas lintas sektor yang menggerakkan berbagai elemen masyarakat di Bumi Batiwakkal, mulai dari komunitas pers, korporasi swasta, hingga kepolisian.

Salah satu titik kemeriahan terpantau jelas di Halaman Sekretariat PWI Berau, Jalan Murjani II, Tanjung Redeb pada Rabu (27/5/2026).

Kolaborasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Berau bersama Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Berau sukses menyembelih empat ekor sapi kurban untuk dibagikan kepada anggota dan warga sekitar.

Empat ekor sapi tersebut berasal dari dukungan mitra strategis serta bantuan langsung dari Bupati Berau, Sri Juniarsih.

Ketua PWI Berau, Yudhi Perdana, menegaskan Iduladha merupakan momentum penting memperkuat rasa kepedulian sosial di kalangan insan pers.

"Melalui kegiatan ini kami ingin mempererat silaturahmi dan berbagi kebahagiaan dengan masyarakat," ujarnya.

Senada, Ketua SMSI Berau, Dedy Warse-



to, menilai gerakan kurban bersama ini menjadi cerminan kekompakan organisasi pers.

"Harapannya, momentum Iduladha kali ini menjadi ruang untuk mempererat rasa persaudaraan antar wartawan," kata Dedy.

Di sudut lain, aksi sosial yang tidak kalah masif ditunjukkan oleh dunia usaha korporasi. Sebanyak 25 ekor sapi milik PT Prima Anugerah Sejahtera Nusantara (PASN) bersama PT Prima Mas Berau (PMB) dipotong serentak dan didistribusikan kepada karyawan, masyarakat sekitar pelabuhan, serta pengurus masjid.

Langkah ini luar biasa mengingat kondisi ekonomi saat ini sedang lesu akibat tekanan global.

Ketua Panitia, Adi Putra Pratama, mengonfirmasi seluruh distribusi berjalan lancar berkat semangat gotong royong.

"Dalam pelaksanaannya kami juga melibatkan para senior dan tokoh di pelabuhan agar kegiatan berjalan lancar," ujar Adi, Kamis (28/5/2026).

Secara akumulatif, total hewan kurban yang disal-

urkan PT PMB dan PT PASN tahun ini mencapai 81 ekor sapi dan 4 ekor kambing.

Perwakilan manajemen PT PASN, Hasanuddin, turut menyampaikan apresiasi kepada Direktur PT PASN dan PT PMB, Nugrahi Mawan, yang berhalangan hadir langsung.

"Mudah-mudahan tahun depan kegiatan seperti ini bisa kembali dilaksanakan dan jumlahnya semakin bertambah, sehingga manfaatnya lebih luas dirasakan masyarakat," ujar Hasanuddin.

Semangat berbagi juga terpancar dari Polres Berau yang tahun ini menyalurkan 31 ekor sapi dan 15 ekor kambing.

Kapolres Berau, AKBP Ridho Tri Putranto, menyatakan nilai Iduladha sejalan dengan semangat pengabdian Polri.

"Iduladha mengajarkan tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian," tuturnya.

Penyembelihan dipusatkan di Asrama Polres Berau sejak pukul 09.10 WITA. Dari total hewan yang dihimpun, Polres Berau menyalurkan enam ekor sapi dan sepuluh ekor kambing ke



AKBP RIDHO TRI PUTRANTO
Kapolres Berau

Total ada 31 Sapi dan 15 kambing yang dikurbankan Polres Berau beserta polsek jajaran"

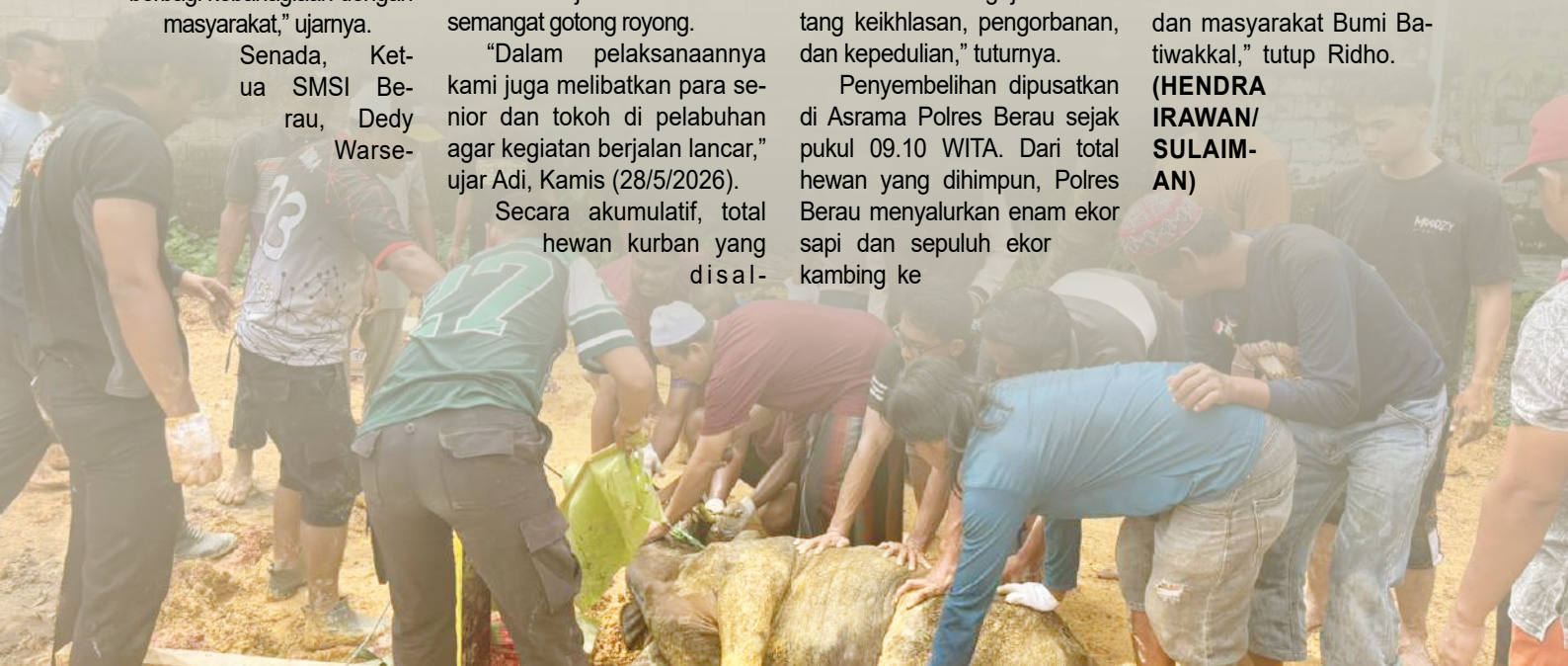
Polda Kalimantan Timur, sedangkan sisanya didistribusikan ke wilayah hukum Polres Berau.

"Total ada 31 Sapi dan 15 kambing yang dikurbankan Polres Berau beserta polsek jajaran," terang Ridho.

Gerakan sosial ini diharapkan mempererat silaturahmi warga.

"Semoga momentum Iduladha ini membawa keberkahan bagi kita semua dan semakin memperkuat kebersamaan antara Polres Berau dan masyarakat Bumi Batiwakkal," tutup Ridho.

(HENDRA IRAWAN/ SULAIM-AN)



Drama Nelayan dan Pencari Gaharu

Hilang Tersesat di Hutan Berau

KETEGANGAN dan rasa cemas yang sempat menyelimuti masyarakat di dua wilayah berbeda di Kabupaten Berau akhirnya berbuah keharuan.

Dalam kurun waktu yang hampir bersamaan, tiga orang yang sempat dinyatakan hilang di tengah ganasnya alam liar Borneo, akhirnya berhasil ditemukan.

Kisah dramatis pertama datang dari pesisir selatan. Seorang nelayan asal Kampung Batu Putih bernama Suriansyah (47) dilaporkan hilang misterius saat mencari ikan pada Minggu (24/5/2026).

Hilangnya Suriansyah sempat membuat warga geger lantaran perahu miliknya ditemukan mengapung di tepi hutan mangrove beserta jaring ikan yang masih terpasang dan alat pancing di tengah laut, namun ia tidak ada di lokasi.

Kasi Penyelamatan dan Evakuasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Berau, Moch Nur Alimi Zain, menyebut laporan diterima sekira pukul 11.00 WITA oleh Pos Polairud Batu Putih.

Misteri hilangnya korban bahkan sempat memicu dua dugaan sementara dari kepolisian yang melakukan penyelidikan, mulai kemungkinan serangan hewan buas hingga dugaan tindak pidana akibat



isu sempat cekkuk dengan sesama nelayan.

"Beberapa hari sebelumnya korban dikabarkan sempat cekkuk dengan sesama nelayan. Tapi dugaan ini masih dalam penyelidikan kepolisian," ujar Nur Alimi.

Namun, setelah hilang selama kurang lebih 36 jam di kawasan hutan bakau, mukjizat datang pada Senin (25/5/2026) pukul 13.47 WITA.

Kepala Kampung Batu Putih, Krisdiyanto, mengonfirmasi, tim gabungan berhasil menemukan Suriansyah di sekitar hutan bakau dalam kondisi hidup. Namun sangat lemas dan mengalami trauma berat setelah bertahan lebih dari satu hari.

"Lokasinya tidak jauh dari perahu korban yang sebelumnya ditemukan di sekitar hutan mangrove," ungkap Krisdiyanto.

to.

Belum kering peluh tim penyelamat, drama pencarian manusia hilang kembali terjadi di kawasan daratan Berau. Setelah dilakukan pencarian intensif selama lebih dari empat hari, dua warga Kampung Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, yang dikabarkan hilang di tengah hutan akhirnya juga ditemukan dalam kondisi selamat pada Rabu (27/5/2026).

Kedua korban, Paharuddin (57) dan Sawaluddin (44), sebelumnya berangkat bersama tiga rekannya untuk mencari kayu gaharu sejak Kamis (21/5/2026).

Berdasarkan kronologi kejadian, rombongan pencari gaharu ini memutuskan kembali ke pondok pada siang hari, namun hanya tiga orang yang tiba lebih dahulu.

Sedangkan, Paharuddin dan Sawaluddin tidak kunjung kembali hingga memicu pencarian mandiri dan laporan ke Pospol Labanan.

Operasi besar-besaran pun digelar melibatkan Disdamkarmat Berau, Redkar, masyarakat, hingga pihak keluarga.

Memasuki hari keempat, tim gabungan akhirnya berhasil melacak keberadaan kedua korban di sekitar tepi Sungai Inaran, dengan jarak sekitar 13 kilometer dari pondok tempat mereka bermalam.

Dari pengakuan kedua korban, mereka murni kehilangan arah akibat tersesat di dalam lebatnya hutan belantara.

"Dari pengakuan korban, mereka tersesat di dalam hutan," jelas Nur Alimi.

Setelah berhasil ditemukan dan dievakuasi dari tepi sungai, tim gabungan bersama warga langsung membawa Paharuddin dan Sawaluddin menuju Puskesmas Labanan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan intensif.

Kondisi fisik keduanya dilaporkan sangat lemas akibat kehabisan energi saat berjuang bertahan hidup di tengah belantara selama beberapa hari, sebelum akhirnya kini dinyatakan aman dan telah resmi kembali berkumpul bersama keluarga mereka masing-masing. (HENDRA IRAWAN)

SAWIT RAKYAT TERJUN BEBAS

LEMAHNYA harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit beberapa waktu terakhir mulai memukul perekonomian petani mandiri di Berau. Penurunan paling dirasakan petani kecil di pedalaman yang menggantungkan hidup dari perkebunan.

Salah satu petani di Kecamatan Segah, Andi, mengungkapkan harga TBS yang awalnya bertengger di angka Rp3.130 per kilogram perlahan menyusut ke Rp3.055, merosot ke level Rp2.900, hingga anjlok drastis sebesar Rp600 menuju posisi Rp2.335 per kg pada 22 Mei, sebelum naik tipis menjadi Rp2.410 per kg per 25 Mei.

Jatuhnya harga ini disinyalir dipengaruhi sentimen pasar pasca-pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai rencana pemusatan arus ekspor-impor menjadi satu pintu.

Kondisi berbanding terbalik dengan pasar global yang aman, sehingga memicu tanda tanya besar di kalangan petani.

"Kalau kita lihat harga CPO itu aman-aman saja, tapi kok TBS-nya bisa terjun bebas, kita lihat-lihat ternyata efeknya itu waktu statement-nya presiden yang mau bikin ekspor satu pintu, makanya sampai

turun terjun bebas," ujar Andi, Selasa (26/5/2026).

Para petani mandiri di Segah kesulitan karena mayoritas Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tidak mengacu pada ketetapan harga resmi Dinas Perkebunan. Perusahaan lebih memilih skema harga Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) yang jauh lebih murah.

Ketimpangan ini menyusahkan petani kecil karena modal operasional mereka habis tersedot untuk biaya sewa truk, BBM, dan ongkos angkut.

Ia berharap Pemkab Berau turun tangan memfasilitasi penggunaan harga Disbun dengan perusahaan karena 95 persen penduduk Segah mengandalkan sektor ini.

"Rp800 atau Rp500 rupiah kalau dilihat kecil. Tapi kalau dikali ribuan ton kan besar sekali," tambah Andi.

Kondisi pelik ini diamini Akbar Patompo, petani sawit rakyat sekaligus tokoh pemuda Berau. Akbar mengungkapkan harga TBS sawit mandiri kini hanya di kisaran Rp2.300-2.600 per kilogram, turun jauh dari posisi sebelumnya yang sempat menembus Rp3.420 per kilogram.

"Petani sawit rakyat hari ini berada pada posisi yang sangat

sulit. Ketika harga TBS turun drastis, yang paling merasakan dampaknya adalah petani kecil. Biaya pupuk, perawatan kebun, dan kebutuhan operasional terus meningkat, sementara harga jual hasil panen justru terjun bebas," jelas Akbar, Minggu (24/5/2026).

Akbar menilai petani berada di posisi paling rentan dalam rantai perdagangan karena tidak memiliki daya tawar menentukan harga adil di tingkat pabrik.

"Negara harus hadir memastikan petani tetap bisa bertahan dan hidup layak dari kebunnya sendiri," tegas Akbar.

Wakil Ketua DPRD Berau, Subroto, mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah taktis.

"Ini kan kebijakan ada di pusat ya, pemerintah pusat supaya melihat kondisi yang ada di lapangan dan cepat mengambil langkah," ungkap Subroto.

Kondisi kian genting setelah Subroto menerima kabar perusahaan sawit di pesisir Berau berencana membatasi masuknya truk pengangkut buah milik petani mandiri.

Jam operasional pabrik yang semula dibuka sepanjang hari akan dipangkas ketat



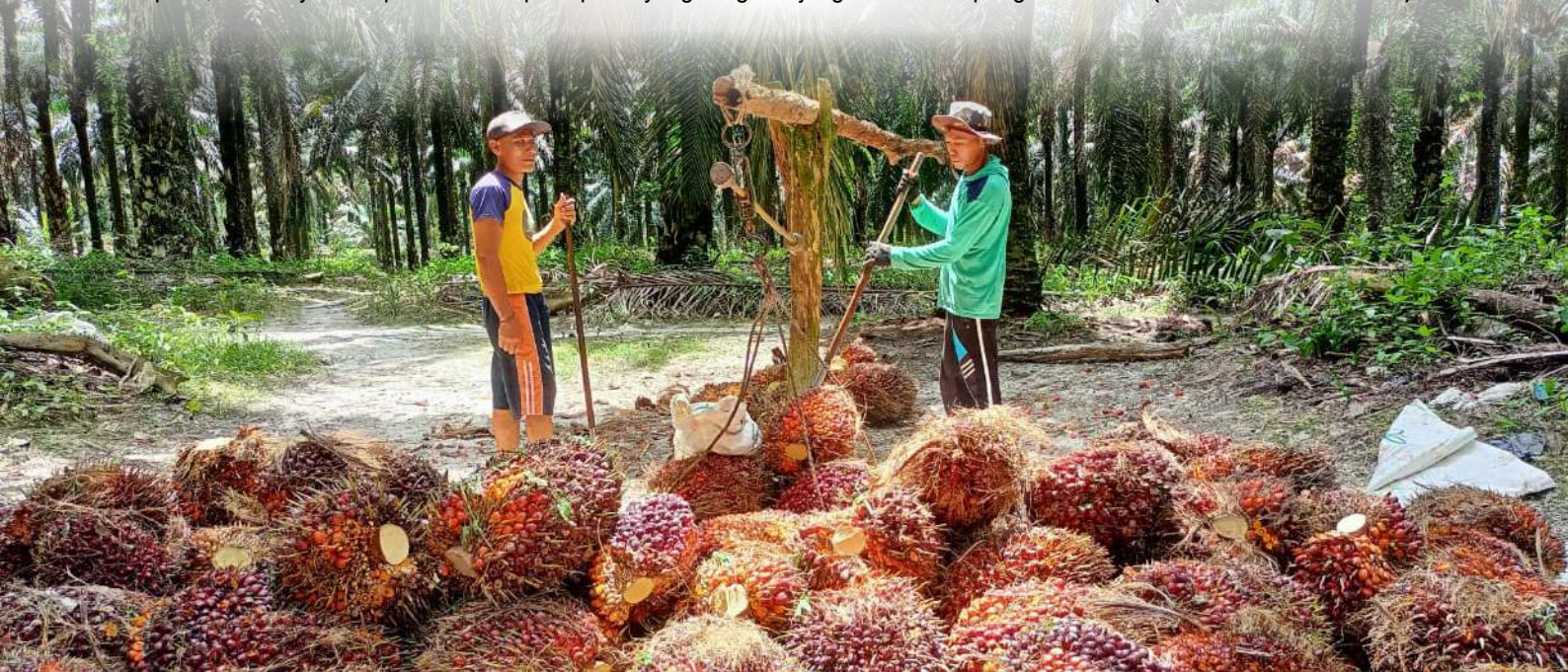
AKBAR PATOMPO
Tokoh Pemuda Berau

Negara harus hadir memastikan petani tetap bisa bertahan dan hidup layak dari kebunnya sendiri"

hanya pada dini hari pukul 01.00-05.00 WITA atau malam hari pukul 19.00-00.00 WITA.

"Habis itu nanti dibatasi lagi, yaitu berapa per SPK, itu bisa masuk per harinya ke perusahaan. Ini saya kira sangat berpengaruh besar ya terkait kebijakan pusat ini tergantung dengan keadaan yang di lapangan," cetus Subroto.

Ia menuntut kepekaan pemerintah pusat untuk memberikan stimulus agar harga beli kelapa sawit petani dapat secepatnya dikembalikan ke posisi normal. **(ADRIKNI SHOLIKHATI)**



MENJAGA WARISAN BUDAYA UMAN UNDAT

Tradisi Syukur Panen Padi Suku Dayak Kenyah

MASYARAKAT Adat Dayak Kenyah Lepoq di Kampung Tepian Buah, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, kembali menggelar tradisi tahunan Uman Undat, Sabtu (23/5/2026).

Ritual adat yang dilaksanakan pasca-panen padi ini merupakan bentuk ungkapan syukur yang mendalam kepada Sang Pencipta atas kelimpahan hasil bumi dan perlindungan selama musim tanam.

Ketua Adat Dayak Kenyah Tepian Buah, Askila Lujuk, menjelaskan, Uman Undat bukanlah sekadar pesta rakyat,



melainkan warisan leluhur yang sarat akan nilai spiritual dan historis.

"Acara Uman Undat ini memang satu acara yang dulu rutin dilaksanakan oleh leluhur kita, bahkan sejak zaman kita masih menganut kepercayaan animisme," ujar Askila saat ditemui di sela-sela acara.

Menjaga Tradisi Lintas Zaman

Menurut Askila, ritual ini telah melewati berbagai era kepercayaan lokal, mulai dari masa adat un hingga peralihan ke Ungan Walan Pesung Uluan.

Di kedua era tersebut, Uman Undat selalu rutin digelar setiap akhir musim tanam padi sebagai bentuk penghormatan kepada pencipta semesta.

la juga meluruskan

persepsi keliru mengenai waktu pelaksanaan ritual ini.

Askila menegaskan, Uman Undat wajib digelar setiap tahun setelah proses potong padi selesai, tanpa harus menunggu adanya panen raya yang besar.

"Setiap tahun dilaksanakan, bukan tergantung dengan panen raya. Berapapun hasil yang kita dapatkan, kita harus tetap mensyukuri bahwa Sang Pencipta sudah memelihara dan menjaga kita semua dalam satu musim tanam," tegasnya.

Filosofi Kebersamaan dalam Sepotong Bambu

Secara harfiah dan prosesi, Uman Undat merefleksikan nilai gotong royong dan kebersamaan yang kuat antarwarga kampung.

Nama tradisi ini merujuk

langsung pada proses pembuatan hidangan khas yang dikonsumsi bersama.

Prosesinya dimulai dari warga yang mengumpulkan beras hasil panen secara kolektif.

Beras tersebut kemudian ditumbuk bersama-sama hingga menjadi tepung halus.

Selanjutnya, adonan tepung dimasukkan ke dalam bilah-bilah bambu untuk dimasak di atas bara api.

Setelah matang, hidangan tersebut disajikan dan disantap bersama seluruh masyarakat.

"Kita kumpul, kita tumbuk jadi tepung, masukkan di bambu, kita masak, baru kita bersama-sama memakannya. Di situlah letak rasa syukur dan kebersamaannya," pungkas Askila. **(RUSDIYONO)**

